


Pengaruh Pengangguran dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

Yesi Veronika Simarmata¹, Pani Iglesia Marsyauli Simamora², Feny Amelia Sinaga³, Diana Winata Lumban Gaol⁴, Agustin Olivia Simamora⁵, Muhammad Yusuf Harahap⁶

^{1,2,3,4,5,6} Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Jl. Willian Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia.

E-mail: yesyveronicasimarmata@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6598>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 10 Juni 2026

Revised: 29 Juni 2026

Accepted: 1 Juli 2026

Kata Kunci

Kemiskinan, Pengangguran, Upah Minimum Provinsi, Regresi Linear Berganda, Sumatera Utara

Keywords

Poverty, Unemployment, Provincial Minimum Wage, Multiple Linear Regression, North Sumatra



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengangguran dan UMP terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder time series periode 2008–2025 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengangguran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai probabilitas sebesar 0,2464. Sementara itu, UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai probabilitas sebesar 0,0004. Secara simultan, pengangguran dan UMP berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai Prob (F-statistic) sebesar 0,000008. Nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,762930 menunjukkan bahwa 76,29% variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kebijakan upah minimum yang efektif serta penguatan kualitas pasar tenaga kerja menjadi strategi penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

This study aims to analyze the effect of unemployment and the Provincial Minimum Wage on poverty in North Sumatra Province. The research employs a quantitative approach using secondary time-series data from 2008–2025 obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of North Sumatra Province. Data analysis was conducted using multiple linear regression with the assistance of EViews 12 software. The results indicate that unemployment has a positive but insignificant effect on poverty, with a probability value of 0.2464. Meanwhile, the Provincial Minimum Wage has a negative and significant effect on poverty, with a probability value of 0.0004. Simultaneously, unemployment and the Provincial Minimum Wage significantly affect poverty, as indicated by a Prob(F-statistic) value of 0.000008. The Adjusted R-Squared value of 0.762930 shows that 76.29% of the variation in poverty can be explained by these two variables, while the remaining 23.71% is influenced by other factors outside the model. These findings suggest that effective minimum wage policies and improvements in labor market quality are important strategies for poverty alleviation in North Sumatra Province.

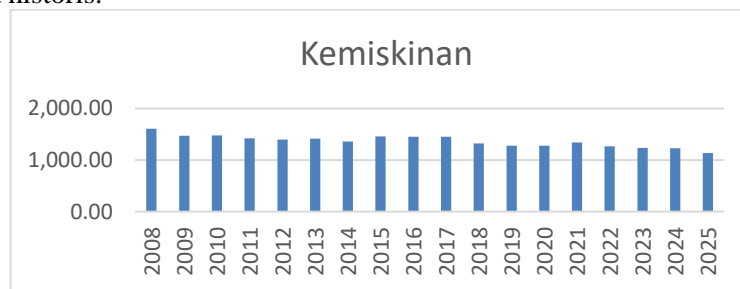


This is an open access article under the CC–BY-SA license.

How to Cite Ahnaf Naufali Rosyad el at (2026) Evaluasi Dan Penguatan Administrasi, Supervisi Serta Arah Masa Depan Lembaga Pendidikan Islam <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6598>

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah struktural dan multidimensional yang menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi, terutama pada tingkat regional. Menurut World Bank, kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendapatan dan aset semata, melainkan juga cerminan dari ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar secara bermartabat. Dalam perspektif ekonomi makro, Syuhada et al. (2024) menjelaskan bahwa kemiskinan yang persisten di suatu daerah mengindikasikan adanya hambatan dalam distribusi pendapatan serta belum optimalnya penyerapan faktor produksi tenaga kerja. Sebagai salah satu provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, Sumatera Utara terus berupaya menekan laju kemiskinan. Namun, dinamika kemiskinan daerah ini masih menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi kuat oleh indikator ketenagakerjaan dan regulasi upah. Mengingat karakteristik ekonomi antarwilayah di Pulau Sumatera yang sangat dinamis, Sembiring et al. (2025) menekankan perlunya analisis mendalam terhadap faktor penentu kemiskinan, seperti jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta Upah Minimum Provinsi (UMP). Untuk memahami dinamika tersebut, berikut ini adalah tren perkembangan data kemiskinan secara historis:



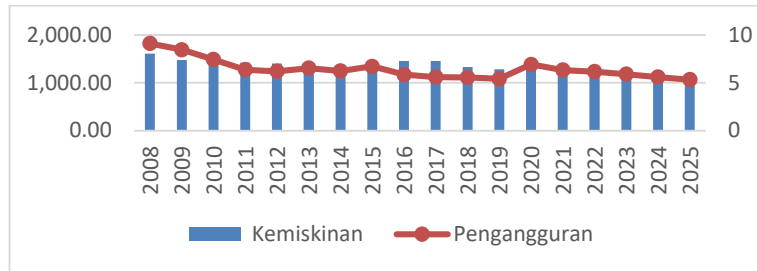
Gambar 1. Perkembangan Data Kemiskinan Tahun 2008-2025 Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan gambar tersebut, tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2008 hingga 2025 menunjukkan pola yang tidak stabil, dengan angka kemiskinan yang naik-turun setiap tahunnya. Pada awal periode tersebut, persentase penduduk miskin masih cukup tinggi, namun secara perlahan mengalami penurunan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan berbagai upaya pemerintah dalam menangani kemiskinan. Meski demikian, terdapat beberapa tahun di mana angka kemiskinan kembali meningkat, dipicu oleh kondisi ekonomi baik secara nasional maupun global, seperti perlambatan ekonomi dan dampak pandemi Covid-19.

Secara keseluruhan, tren penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. Namun, karena penurunan tersebut belum berjalan secara terus-menerus, persoalan kemiskinan tetap menjadi tantangan serius yang perlu ditangani lebih lanjut. Menurut teori Chambers (1983), kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang kerja. Dengan demikian, perubahan tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat pengangguran dan besaran upah minimum, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Faktor utama yang secara teoritis erat kaitannya dengan kemiskinan adalah pengangguran. Pengangguran merujuk pada kondisi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan meskipun sedang aktif mencari. Tingginya angka pengangguran berdampak langsung pada hilangnya sumber pendapatan, sehingga kemampuan memenuhi kebutuhan hidup menjadi semakin terbatas. Lincoln Arsyad menekankan adanya korelasi kuat antara pengangguran dan kemiskinan, karena tanpa pekerjaan, seseorang sulit memperoleh pendapatan yang cukup untuk bertahan hidup.

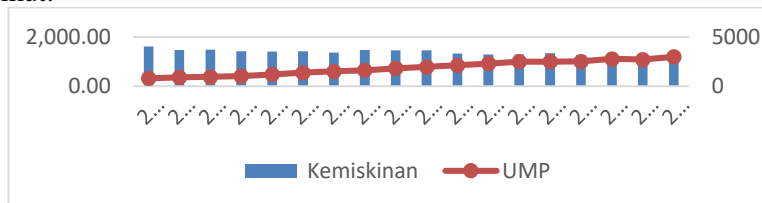
Kuncoro (2006) dalam Fajriansyah dan Chandriyanti (2022) menegaskan bahwa peningkatan jumlah pengangguran secara otomatis akan menurunkan pendapatan riil masyarakat, membatasi daya beli, dan menjebak kelompok usia produktif ke dalam lingkaran kemiskinan. Secara empiris, hubungan positif ini diperkuat oleh studi Alvia et al. (2024) yang menyatakan bahwa tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan beban ekonomi yang memicu pembengkakan jumlah penduduk miskin akibat ketiadaan sumber penghasilan tetap. Untuk melihat sejauh mana fenomena ketenagakerjaan ini memengaruhi kesejahteraan di Sumatera Utara, berikut disajikan tren data historis pengangguran dan kemiskinan:



Gambar 2. Perkembangan Data Kemiskinan dan Pengangguran Tahun 2008-2025 Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Gambar 2, visualisasi data kurun waktu 2008 hingga 2025 memperlihatkan pergerakan yang searah antara pengangguran dan kemiskinan. Secara historis, lonjakan drastis pengangguran pada awal tahun 2000-an berkorelasi langsung terhadap pergeseran puncak absolut jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara yang sempat menyentuh angka hampir 2 juta jiwa. Fenomena jeda waktu ini sesuai dengan analisis *time lag* ekonomi makro yang dikemukakan dalam penelitian Effendi et al. (2023), di mana guncangan pada sektor ketenagakerjaan membutuhkan waktu penyesuaian (*adjustment*) sekitar 1 hingga 2 tahun untuk bermanifestasi penuh menjadi kemiskinan riil di tingkat rumah tangga. Setelah periode krisis tersebut, keberhasilan pemerintah daerah menekan angka pengangguran terbukti secara linier diikuti oleh penurunan jumlah penduduk miskin hingga mencapai titik terendah pada proyeksi tahun 2025, terkecuali pada tahun 2020 akibat distorsi ekonomi pandemi COVID-19. Sebagaimana dijelaskan oleh Dakhilullah (2023), pandemi tidak hanya menciptakan disrupsi pada aktivitas ekonomi, tetapi juga mengubah struktur pasar tenaga kerja yang berdampak langsung pada peningkatan jumlah penduduk miskin di berbagai provinsi di Indonesia.

Selain faktor kesempatan kerja, kebijakan intervensi pemerintah melalui penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Regional (UMR) memegang peranan krusial sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Secara teori, hubungan antara UMP dan kemiskinan bersifat negatif artinya, semakin tinggi upah minimum, semakin besar kemungkinan masyarakat terbebas dari kemiskinan. Kenaikan UMP dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga, memperluas konsumsi, serta mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, kenaikan upah juga dapat mendorong permintaan barang dan jasa, yang pada gilirannya menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian daerah. Berdasarkan *Efficiency Wage Theory* (Teori Upah Efisiensi), tingkat upah yang memadai di atas batas subsisten tidak hanya memotivasi produktivitas pekerja, tetapi juga menjamin pemenuhan standar hidup layak bagi rumah tangga (Kaufman, 2000 dalam Effendi et al., 2023). Dinamika instrumen upah terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3. Perkembangan Data Kemiskinan dan UMP Tahun 2008-2025 Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Gambar 3, terlihat jelas adanya hubungan yang berlawanan arah (*inverse correlation*) membentuk pola silang antara tren UMP yang konsisten bergerak naik dan jumlah penduduk miskin yang terus melandai turun. Fenomena pergerakan data makro ini sangat sejalan dengan kesimpulan Wiryawan dan Pratiwi (2024), yang menyatakan bahwa peningkatan upah secara rutin bertindak sebagai *social safety net* (jaring pengaman sosial) yang efektif mendongkrak *disposable income* (pendapatan disposabel) kelas pekerja. Secara empiris, Dongoran et al. (2023) serta Alliyah et al. (2024) membuktikan bahwa regulasi upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti setiap peningkatan standar upah minimum secara rutin akan memperluas kemampuan ekonomi pekerja untuk keluar dari garis kemiskinan. Peningkatan daya beli ini memungkinkan kelompok rumah tangga rentan di Sumatera Utara untuk mengonsumsi barang dan jasa pokok di atas batas garis kemiskinan secara struktural, sekalipun dihadapkan pada tantangan inflasi daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang teoritis serta fenomena empiris historis tersebut, intervensi pengangguran dan kebijakan upah terbukti menjadi pilar utama dalam menentukan keberhasilan pemotongan rantai kemiskinan daerah. Meskipun hubungan antara pengangguran, upah minimum, dan kemiskinan telah banyak dikaji dalam literatur ekonomi makro, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dari sisi rentang waktu observasi yang lebih panjang, yaitu periode 2008–2025. Berbeda dengan studi sebelumnya yang umumnya hanya mencakup data hingga tahun 2022 (Effendi et al., 2023; Alliyah et al., 2024), penelitian ini mampu menangkap dinamika ekonomi Sumatera Utara secara lebih komprehensif, termasuk tren pemulihan pasca-pandemi COVID-19 hingga proyeksi tahun 2025. Penggunaan data yang lebih aktual ini sangat krusial untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai efektivitas kebijakan upah minimum dalam menurunkan angka kemiskinan di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan analisis kuantitatif yang lebih mendalam, akurat, dan komprehensif guna menguji signifikansi hubungan simultan maupun parsial antarvariabel makro tersebut.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menganalisis pengaruh Pengangguran dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Menurut Creswell (2014), penelitian kuantitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menguji teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian yang dianalisis menggunakan teknik statistik. Pendekatan ini dipilih karena penelitian memanfaatkan data numerik yang dapat diolah secara statistik untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Lokasi dan Sumber Data Penelitian

Penelitian dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dengan periode pengamatan tahun 2008–2025. Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk time series (deret waktu) yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan meliputi Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Upah Minimum Provinsi (UMP). Pemilihan Provinsi Sumatera Utara sebagai lokasi penelitian didasarkan pada kondisi kemiskinan yang masih menjadi salah satu permasalahan pembangunan daerah. Selain itu, perkembangan tingkat pengangguran yang berfluktuasi dan kebijakan UMP yang terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun menjadi menarik untuk dianalisis pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan (library research). Studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa data kemiskinan, pengangguran, dan Upah Minimum Provinsi yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai buku, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, dan kebijakan upah minimum. Kedua teknik tersebut digunakan untuk memperkuat landasan teoritis sekaligus memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian bersifat valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan dua variabel independen.

1. Kemiskinan (Y)

Kemiskinan merupakan kondisi ketika masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dalam penelitian ini, kemiskinan diukur berdasarkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2008–2025. Variabel ini digunakan sebagai variabel dependen karena menjadi fokus utama penelitian.

2. Pengangguran (X_1)

Pengangguran merupakan kondisi seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tetapi belum memperoleh pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Variabel pengangguran dalam penelitian ini diukur menggunakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang dinyatakan dalam persentase (%). Variabel ini digunakan sebagai variabel independen yang diduga memengaruhi tingkat kemiskinan.

3. Upah Minimum Provinsi (X_2)

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah sebagai batas terendah upah yang harus diterima pekerja dalam satu wilayah provinsi. Dalam penelitian ini, UMP dinyatakan dalam satuan rupiah dan digunakan sebagai variabel independen yang diduga memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda (Multiple Linear Regression) dengan pendekatan Ordinary Least Squares (OLS) dan diolah menggunakan perangkat lunak EViews 12. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Pengangguran dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Kemiskinan baik secara parsial maupun simultan.

Model regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kemiskinan

X_1 = Pengangguran

X_2 = Upah Minimum Provinsi (UMP)

β_0 = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi

e = Error Term

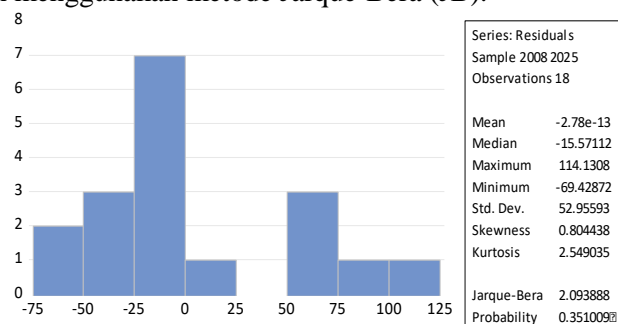
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal. Pengujian dilakukan menggunakan metode Jarque-Bera (JB).



Gambar 4. Hasil Uji Normalitas

Hasil olah data menunjukkan nilai statistik Jarque-Bera sebesar 2,093888 dengan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,351009. Oleh karena nilai probabilitas tersebut jauh lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05 ($0,351009 > 0,05$), maka hipotesis nol (H_0) diterima. Hal ini menjelaskan bahwa residual dari model regresi pengaruh pengangguran (PNG) dan upah minimum provinsi (UMP) terhadap kemiskinan (KMS) di Provinsi Sumatera Utara berdistribusi secara normal. Dengan demikian, asumsi normalitas telah terpenuhi dan model regresi ini valid untuk digunakan dalam pengujian statistik selanjutnya

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antar variabel independen. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF).

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 06/06/26 Time: 11:07
Sample: 2008 2025
Included observations: 18

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	24779.52	140.3391	NA
PNG	341.4606	81.72481	1.907420
UMP	0.000696	15.68457	1.907420

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai Centered VIF untuk variabel Pengangguran (PNG) adalah sebesar 1,907420 dan variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah sebesar 1,907420. Oleh karena nilai Centered VIF dari kedua variabel independen tersebut berada jauh di bawah angka batas maksimal yaitu 10 ($1,907420 < 10$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model ini. Dengan demikian, variabel Pengangguran dan UMP aman digunakan bersama-sama sebagai variabel prediktor dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual dalam model regresi. Pengujian dilakukan menggunakan metode Breusch-Pagan-Godfrey.

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.404880	Prob. F(2,15)	0.6741
Obs*R-squared	0.921942	Prob. Chi-Square(2)	0.6307
Scaled explained SS	0.495875	Prob. Chi-Square(2)	0.7804

Berdasarkan hasil pengujian, indikator utama pada baris Obs*R-squared menunjukkan nilai statistik sebesar 0,921942 dengan nilai probabilitas Prob. Chi-Square(2) sebesar 0,6307. Oleh karena nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05 ($0,6307 > 0,05$), maka hipotesis nol (H_0) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa varians residual dari model regresi bersifat konstan (homoskedastisitas). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini terbebas dari masalah atau gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara residual pada satu periode dengan periode lainnya. Pengujian dilakukan menggunakan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test.

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	1.059741	Prob. F(2,13)	0.3747
Obs*R-squared	2.523279	Prob. Chi-Square(2)	0.2832

Hasil pengujian menunjukkan nilai statistik Obs*R-squared sebesar 2,523279 dengan nilai probabilitas Prob. Chi-Square(2) sebesar 0,2832. Oleh karena nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05 ($0,2832 > 0,05$), maka hipotesis nol (H_0) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi serial antar residual hingga derajat kelambatan (lag) ke-2. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini aman dan terbebas dari masalah autokorelasi, sehingga pengujian menggunakan data deret waktu periode 2008 hingga 2025 ini bersifat valid.

Uji Hipotesis

Setelah uji asumsi klasik terpenuhi, selanjutnya dilakukan tahap pengujian hipotesis model penelitian dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: KMS
Method: Least Squares
Date: 06/06/26 Time: 10:59
Sample: 2008 2025
Included observations: 18

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1450.436	157.4151	9.214081	0.0000
PNG	22.28772	18.47865	1.206133	0.2464
UMP	-0.120074	0.026388	-4.550281	0.0004

R-squared	0.790821	Mean dependent var	1369.195
Adjusted R-squared	0.762930	S.D. dependent var	115.7858
S.E. of regression	56.37589	Akaike info criterion	11.05297
Sum squared resid	47673.61	Schwarz criterion	11.20137
Log likelihood	-96.47675	Hannan-Quinn criter.	11.07343
F-statistic	28.35442	Durbin-Watson stat	1.13327
Prob(F-statistic)	0.000008		

Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan diketahui:

Variabel pengangguran memiliki nilai t-statistic sebesar 1,206133 dengan nilai probabilitas sebesar 0,2464. Karena nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditentukan ($0,2464 > 0,05$), maka hipotesis pertama (H1) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial, pengangguran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Kondisi lapangan mengindikasikan bahwa tidak semua penduduk berstatus pengangguran otomatis jatuh miskin karena adanya alternatif pendapatan informal atau dukungan keluarga.

Variabel upah minimum memiliki nilai t-statistic sebesar -4,550281 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0004. Karena nilai probabilitas tersebut jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan ($0,0004 < 0,05$), maka hipotesis kedua (H2) diterima. Hal ini secara empiris membuktikan bahwa secara parsial, UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan peningkatan upah minimum ini terbukti efektif menjadi jaring pengaman sosial yang meningkatkan daya beli masyarakat kelas pekerja untuk keluar dari garis kemiskinan.

Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan nilai F-statistic sebesar 28,35442 dengan tingkat signifikansi Prob(F-statistic) sebesar 0,000008. Oleh karena nilai probabilitas gabungan tersebut jauh lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ($0,000008 < 0,05$), maka hipotesis ketiga (H3) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara serentak (simultan), variabel Pengangguran (PNG) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki pengaruh yang signifikan dan nyata terhadap Kemiskinan (KMS) di Provinsi Sumatera Utara.

Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan output statistik, diperoleh nilai R-squared sebesar 0,790821 dan nilai Adjusted R-squared sebesar 0,762930. Hal ini mengindikasikan bahwa variasi jumlah Kemiskinan (KMS) di Provinsi Sumatera Utara mampu dijelaskan sebesar 76,29% oleh variabel Pengangguran (PNG) dan Upah Minimum Provinsi (UMP). Sementara sisanya sebesar 23,71% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini yang tidak diikutsertakan dalam estimasi.

Pembahasan:

Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan hasil estimasi regresi linier berganda, variabel Pengangguran (PNG) memiliki koefisien positif sebesar 22,28772 dengan nilai probabilitas uji t sebesar 0,2464. Karena nilai probabilitas $> 0,05$, secara parsial pengangguran berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kemiskinan (KMS) di Provinsi Sumatera Utara. Arah koefisien positif sudah sesuai dengan teori ekonomi, di mana kenaikan pengangguran akan menurunkan pendapatan dan memperluas kemiskinan. Namun, pengaruhnya yang tidak signifikan menunjukkan karakteristik unik di Sumatera Utara. Fenomena ini terjadi karena pengangguran terbuka didominasi oleh kelompok berpendidikan/menengah (voluntary unemployment) yang masih disokong finansial oleh keluarganya. Sementara itu, masyarakat miskin tidak memiliki kemewahan untuk menganggur lama; mereka langsung beralih ke sektor informal (pedagang kecil atau buruh harian) untuk bertahan hidup. Sektor informal inilah yang berfungsi sebagai katup pengaman ekonomi dalam meredam kemiskinan ekstrem.

Temuan empiris penelitian ini sangat sejalan dan memperkuat hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kifayatun dkk. (2025) di Provinsi Sulawesi Tengah, yang menyimpulkan bahwa tingkat

pengangguran terbuka memiliki kontribusi positif tetapi dampaknya tidak signifikan terhadap fluktuasi kemiskinan makro daerah. Selain itu, hasil ini juga konsisten dengan studi nasional oleh Alvia dkk. (2024) yang menemukan bahwa pengangguran berkolerasi positif namun tidak memberikan pengaruh nyata (tidak signifikan) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Ketidaksignifikanan ini membuktikan bahwa strategi pengentasan kemiskinan di Sumatera Utara tidak boleh hanya bertumpu pada penurunan angka pengangguran semata, melainkan harus lebih difokuskan pada peningkatan produktivitas serta jaminan pendapatan pekerja di sektor informal dan penguatan upah minimum.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan hasil estimasi regresi linier berganda, variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki koefisien negatif sebesar $-0,120074$ dengan nilai probabilitas uji t yang sangat signifikan sebesar $0,0004$. Karena nilai probabilitas jauh lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,0004 < 0,05$), secara parsial UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan (KMS) di Provinsi Sumatera Utara.

Secara teoritis, hubungan yang berlawanan arah (inverse correlation) ini mendukung Efficiency Wage Theory (Teori Upah Efisiensi) yang menyatakan bahwa tingkat upah yang layak mampu meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan pekerja. Kebijakan peningkatan UMP secara rutin oleh pemerintah di Sumatera Utara terbukti efektif bertindak sebagai instrumen jaring pengaman sosial. Kenaikan standar upah ini secara langsung mendorong pendapatan disposabel (disposable income) rumah tangga kelas pekerja, sehingga meningkatkan daya beli mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar pokok (pangan, kesehatan, dan pendidikan) di atas garis kemiskinan.

Temuan sejalan dengan penelitian Dongoran dkk. (2023) di Sumatera Utara yang menyimpulkan bahwa upah minimum regional memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat masyarakat miskin. Hasil ini juga diperkuat oleh studi dari Alliyah dkk. (2024) yang meneliti lokus serupa di Sumatera Utara dan menegaskan bahwa peningkatan upah minimum secara nyata berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan daerah. Selain itu, kesimpulan ini konsisten dengan penelitian skala nasional oleh Wiryawan dan Pratiwi (2024) yang menemukan bahwa kebijakan upah minimum di provinsi-provinsi Indonesia memberikan dampak negatif nyata dalam menekan laju kemiskinan.

Pengaruh Pengangguran dan Upah Minimum Provinsi secara Simultan terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengujian simultan (Uji F), diperoleh nilai F-statistic sebesar $28,35442$ dengan tingkat signifikansi Prob(F-statistic) sebesar $0,000008$. Oleh karena nilai probabilitas gabungan tersebut jauh lebih kecil dari taraf nyata $0,05$ ($0,000008 < 0,05$), maka hipotesis ketiga (H3) diterima. Hal ini membuktikan secara empiris bahwa secara serentak (simultan), variabel Pengangguran (PNG) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki pengaruh yang signifikan dan nyata terhadap Kemiskinan (KMS) di Provinsi Sumatera Utara.

Hubungan simultan ini mengindikasikan bahwa masalah kemiskinan di Sumatera Utara merupakan fenomena struktural yang kompleks, di mana penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial. Kebijakan penguatan daya beli melalui peningkatan UMP harus berjalan beriringan dengan stabilitas pasar kerja. Ketidakmampuan pasar kerja formal menyerap angkatan kerja (pengangguran) akan diredam dampaknya jika standar upah pekerja di sektor lain tetap kuat dan sektor informal bergerak produktif. Kekuatan model dalam menjelaskan fenomena ini didukung oleh nilai Adjusted R-squared sebesar $0,762930$. Angka ini menunjukkan bahwa variasi naik-turunnya jumlah kemiskinan di Sumatera Utara mampu dijelaskan sebesar $76,29\%$ oleh variabel Pengangguran dan UMP secara bersama-sama, sedangkan sisanya sebesar $23,71\%$ dijelaskan oleh faktor lain di luar model estimasi.

Temuan simultan ini sejalan dan memperkuat hasil penelitian terdahulu oleh Alliyah dkk. (2024) yang meneliti lokus yang sama di Sumatera Utara, serta Fajriansyah dan Chandriyanti (2022) yang menyimpulkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan dan standarisasi upah minimum secara kolektif memiliki dampak simultan yang sangat determinan dalam menekan laju kemiskinan daerah. Hasil ini juga diperkuat oleh Ashari dan Athoillah (2023) yang menyatakan bahwa intervensi kebijakan makro yang terintegrasi pada sektor upah dan pengangguran menjadi kunci utama optimalisasi pengentasan kemiskinan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, ditemukan bahwa variabel pengangguran memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini menunjukkan

bahwa peningkatan tingkat pengangguran tidak secara langsung menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin secara signifikan, yang mengindikasikan adanya peran sektor informal sebagai sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat. Sebaliknya, variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil ini menegaskan bahwa peningkatan standar upah minimum mampu memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rumah tangga pekerja, serta berkontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara.

Secara simultan, pengangguran dan UMP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan melalui satu kebijakan saja, melainkan memerlukan sinergi antara kebijakan ketenagakerjaan dan kebijakan pengupahan. Selain itu, nilai Adjusted R-Squared sebesar 76,29% mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, peningkatan kualitas pasar tenaga kerja serta penguatan kebijakan upah minimum menjadi instrumen strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya artikel ilmiah ini dengan baik. Kami menyadari bahwa jurnal ini tidak akan rampung tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing kami yang telah memberikan banyak arahan, bimbingan, dan ilmu berharga selama proses penyusunan penelitian ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Medan atas fasilitas akademisnya, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara selaku penyedia data sekunder yang kami gunakan. Tidak lupa, apresiasi setinggi-tingginya untuk orang tua kami yang selalu mendoakan, serta seluruh anggota Kelompok atas kerja keras dan kerja sama tim yang solid dari awal hingga jurnal ini selesai. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu ekonomi regional, khususnya di Sumatera Utara.

REFERENSI

- Alliyah, E. M., Ariwibowo, P., & Nizma, M. (2024). Pengaruh upah minimum dan pengangguran terhadap kemiskinan di Sumatera Utara periode 2005-2022. *Sosio e-Kons*, 16(3), 223–233. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v16i3.25511>
- Alvia, D. O., Efendi, I. W., Malihah, K. P., & Kurniawan, M. (2024). Pengaruh indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan Indonesia tahun 2014-2023. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6), 1–11.
- Ashari, R. T., & Athoillah, M. (2023). Analisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Kawasan Tapal Kuda. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(2), 273-286.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2021). Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: Bappenas.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2024). Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2024. Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara.
- Chambers, R. (1983). *Rural Development: Putting the Last First*. London: Longman.
- Dakhilullah, M. F. (2023). Pengaruh Upah Minimum dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 1(1), 60-75.
- Dongoran, F. R., Sulfina, S. D., Syah, S. A., & Siahaan, T. (2023). Analisis pengaruh ketimpangan pendapatan dan upah minimum regional terhadap kemiskinan di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 1(2), 198-207. <https://doi.org/10.47233/jemb.v1i2.671>
- Effendi, D., Aliyyah, C., & Sinaga, E. N. M. B. (2023). Analysis of the Effect of Unemployment and UMR on Poverty in North Sumatra Province Period (2002-2022). *Indonesian Journal of Accounting and Financial Technology (CRYPTO)*, 1(2), 25-34.
- Fajriansyah, S., & Chandriyanti, I. (2022). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum

- provinsi (UMP) dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 5(2), 558-570.
- Hidayat, R., Imami, M. K. W., Liu, S., Qudratuddarsi, H., & Saad, M. R. M. (2024). Validity of Engagement Instrument During Online Learning in Mathematics Education. *Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi*, 8(2).
- Sembiring, M., Panggabean, L. T., Muntaza, K. R., Azmi, N., Susanti, M. K., & Irfansyah, F. (2025). Analisis pengaruh jumlah penduduk, IPM dan UMP terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera tahun 2020-2024. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 5(1), 109-122.
- Syuhada, M. R., Yafiz, M., & Irham, M. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1), 513-526. <https://doi.org/10.30651/jms.v9i1.21800>
- Wiryanawan, K. J., & Pratiwi, I. A. M. (2024). Pengaruh PDRB dan upah minimum provinsi terhadap kemiskinan dan IPM di provinsi-provinsi Indonesia. *Gema Wisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 20(3), 198-224. <https://doi.org/10.56910/gemawisata.v20i3.405>
- World Bank. (2022). *Poverty and Shared Prosperity 2022: Correcting Course*. Washington, DC: World Bank.